



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)**

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur selalu tercurah kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan Karunia-Nya, sehingga masih diberi kesempatan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023. Penyusunan LAKIP tahun 2023 merupakan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam mengelola perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan selama Tahun 2023. Diharapkan LAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan ini dapat memberikan informasi kepada seluruh stakeholders tentang pencapaian kinerja dalam tahun 2023.

Akhirnya semoga LAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan tahun 2023 ini dapat bermanfaat untuk dijadikan bahan Evaluasi bagi peningkatan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam Rangka mencapai tujuan pembangunan daerah dimasa yang akan datang.

Buntok, Februari 2024

Plt. INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN



YURISTIANTI YUDHA, S.Hut, M.M, CGCAE

NIP. 19731220 200801 2 010

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan kinerja pemerintah yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan dan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan .

Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah , agar pemerintah daerah berjalan sesuai rencana secara efektif dan efisien serta mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor : 11 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan, Inspektorat Daerah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1.2.1. Tugas

Inspektorat Kabupaten Barito Selatan mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten dan Desa.

1.2.2. Fungsi

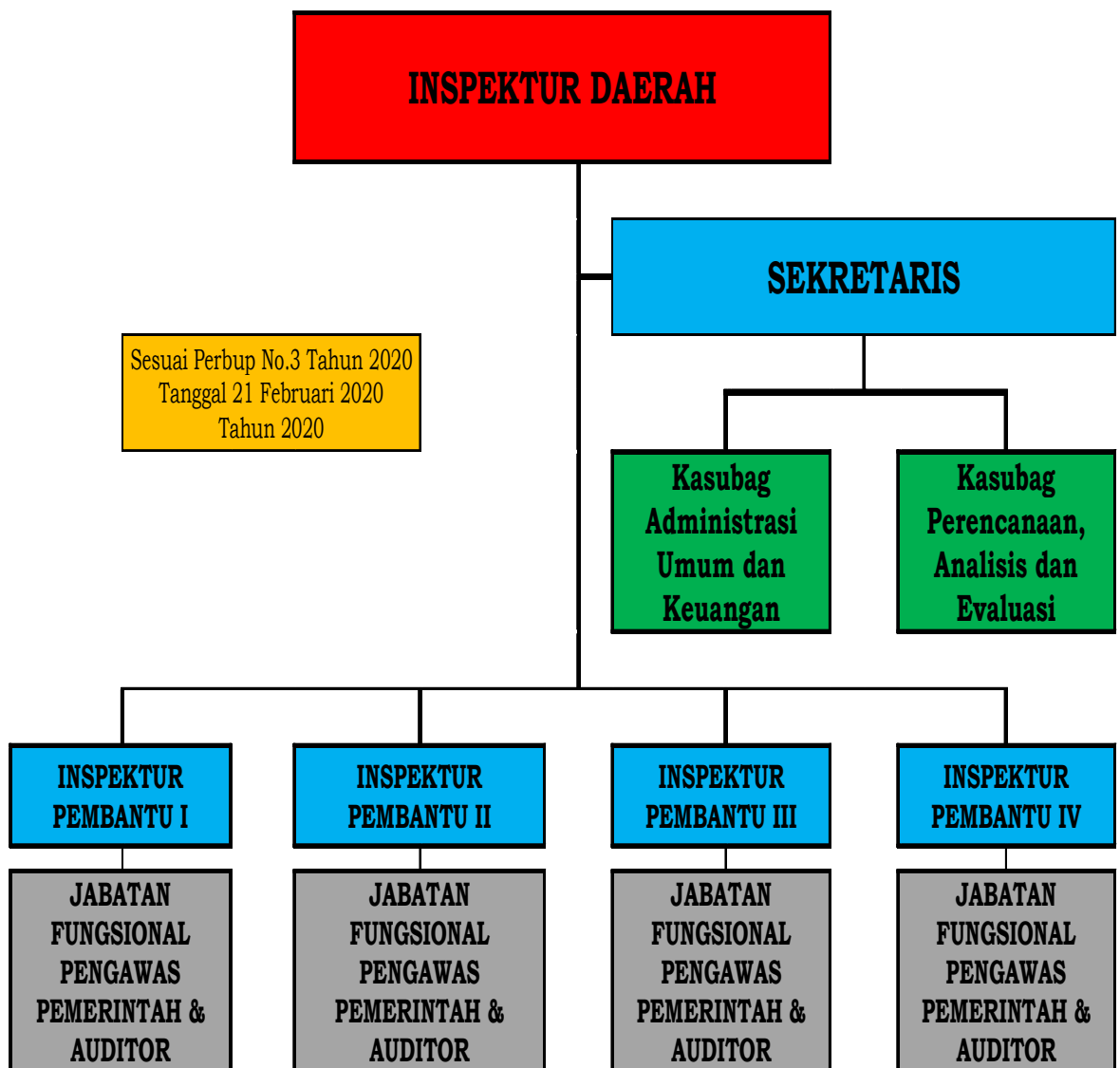
Untuk melaksanakan tugas dimaksud Inspektorat menyelenggarakan fungsi;

- Penyusunan perencanaan program pengawasan;
- Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Barito Selatan;
- Pelaksanaan reviu laporan keuangan pemerintah daerah dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
- Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;

- Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
- Pelaksanaan pembinaan terhadap tenaga structural dan fungsional dilingkungan Inspektorat ; dan
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi;
- Pelaksanaan pelayanan teknis administratif dan fungsional

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan sesuai Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan. (Lampiran)



D. Isu Strategis Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, isu strategis adalah kondisi/hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi/hal bersifat penting, mendasar, berjangka panjang,

mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang.

Pengawasan Intern Pemerintah Daerah merupakan unsur manajemen pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, agar pemerintah daerah berjalan sesuai rencana secara efektif dan efisien serta mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugasnya Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan tidak hanya bertindak sebagai Pemeriksa, tetapi lebih banyak berfungsi sebagai katalisator perubahan yang melaksanakan 3 (tiga) peran penting terdiri dari :

1. Penjamin Mutu (*Quality Assurance*) atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah,
2. Pemberi Peringatan Dini (*Early Warning System*) meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah,
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola (*Consultative Management*) penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Inspektorat Kabupaten Barito Selatan sangat strategis, karena tidak hanya menemukan terjadinya penyimpangan atau penyelewengan yang telah terjadi, tetapi lebih pada upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta mengevaluasi efektivitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Barito Selatan.

Agar fungsi pengawasan dapat dilakukan secara terarah, efisien, efektif dan terpadu, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) setiap tahunnya yang disinergikan dengan kebijakan pengawasan daerah oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan pemerintah Pusat.

Kegiatan Pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan, sebagai berikut :

- A. Penyelenggaraan Pengawasan Internal (Kode Kegiatan 6.01.02.2.01); dengan Sub Kegiatan :
 - a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Barito Selatan hasil dari Pemeriksaan berbentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disusun secara menyeluruh dengan keluaran sebanyak 31 LHP.
(Kode Rekening Pembiayaan : 6.01.02.2.01.01)
 - b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Reviu LKPD)
Melaksanakan pengawasan atas laporan keuangan sebelum disampaikan kepada Bupati, dan reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebelum disampaikan oleh Bupati ke BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

- c. **Reviu Laporan Kinerja**
Melaksanakan reviu atas laporan kinerja pemerintah daerah sebelum disampaikan oleh Bupati ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Pembiayaan untuk kegiatan ini diambil dari kegiatan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
(Kode Rekening Pembiayaan (6.01.02.2.01.03)
- d. **Reviu Laporan Keuangan**
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA- SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi progam dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Reviu direncanakan akan dilaksanakan dalam dua kegiatan yaitu reviu terhadap RKA SKPD Tahun Anggaran 2022 dan RKA Perubahan SKPD Tahun Anggaran 2022.
Tujuan reviu dilaksanakan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa RKA SKPD Tahun Anggaran 2022 dan RKA Perubahan SKPD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai/terdapat sinkronisasi dengan :
- 1) Rencana Kerja (Renja) SKPD;
 - 2) Pedoman penyusunan RKA-SKPD;
 - 3) Kebijakan Umum APBD (KUA); dan
 - 4) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- (Kode Rekening Pembiayaan 6.01.02.2.01.04).
- e. **Pengawasan Desa;**
Melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa atas 86 Desa yang ada di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.
(Kode Rekening Pembiayaan 6.01.02.2.01.05)
- f. **Kerjasama Pengawasan Internal**
Kerjasama bertujuan terbentuknya kesepakatan Pengawasan Internal untuk Pemerintahan Kabupaten Barito Selatan. (Kode Rekening Kegiatan 6.01.02.2.01.06)
- g. **Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP**
Pemantauan/Monitoring Evaluasi dilaksanakan untuk menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten.
(Kode Rekening Pembiayaan 6.01.02.2.01.07)
- h. **Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah**
Menyelenggarakan Penyelesaian Kerugian Daerah hasil Temuan Pemeriksaan melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MP-PKD).
(Kode Rekening Pembiayaan 6.01.02.2.02.01)
- i. **Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu ,Pemeriksaan Khusus atas kebenaran laporan/pengaduan mengenai adanya indikasi melawan hukum maupun Korupsi

Kolusi Nepotisme yang dilakukan apabila ada laporan/pengaduan dari masyarakat yang ditujukan kepada Bupati maupun instansi lainnya.

(Kode Rekening Pembiayaan 6.01.02.2.02.02).

j. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Penyusunan Rumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan (Kode Rekening Pembiayaan 6.01.03.2.01.01)

k. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi.

Pendampingan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (Kode Rekening Pembiayaan 6.01.03.2.02.02)

l. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Inspektorat Kabupaten Barito Selatan membuka ruang dan tempat bagi Dinas/Instansi/Badan dan Pemerintah Desa yang memerlukan pelayanan konsultasi sebagai upaya pencegahan (*early warning system*) terhadap tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang menyebabkan kerugian Negara. Peran Inspektorat Kabupaten Barito Selatan dalam pembinaan dan pencegahan tindak pidana korupsi didukung oleh Pejabat Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah dan Auditor yang selalu siap dan bersedia memberikan pelayanan konsultasi. (Kode Rekening Pembiayaan 6.01.03.2.02.03)

m. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

Pendampingan Penegakan Integritas (Kode Rekening Pembiayaan 6.01.03.2.02.04).

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

LaKIP memberikan penjelasan pencapaian kinerja (Performance Result) Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023. Pencapaian Kinerja (Performance Result) dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (Performance Agreement) sebagai tolok ukur kinerja tahunan organisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja dimasa depan.

Sistematika penyajian laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Lakip, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam Bab ini diuraikan ringkasa/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
B. REALISASI ANGGARAN

BAB IV PENUTUP

Dalam Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa yang akan datang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses penyusunan langkah- langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan, perencanaan kinerja disusun dan kemudian ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Untuk mencapai sasaran maka perlu untuk menetapkan indikator dan target kinerja yang menjadi indikator kinerja utama Inspektorat Daerah dan kemudian dituangkan dalam perjanjian kinerja agar penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan dapat lebih terarah untuk dapat memastikan pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Barito Selatan. Ringkasan isi Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel. Sasaran, Indikator, Target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Ket
1.	Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Persentase Temuan BPK yang selesai ditindaklanjuti	%	80	
		Persentase Temuan Inspektorat yang selesai ditindaklanjuti	%	100	
2.	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern (SPIP)	Maturitas SPIP	Level	3	
3.	Meningkatnya penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Pengaduan Masyarakat yang selesai ditindak lanjuti	%	100	
4.	Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pengelolaan desa meliputi ADD dan DD	Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa	Desa	86	
5.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level APIP	Level	3	

Program dan Anggaran dalam perjanjian kinerja

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 5.467.348.445,00	APBD
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 306.398.000,00	APBD
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 11.876.946.526,00	APBD

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja yang merupakan garda depan menuju good governance berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk sebaik-baiknya pelayanan publik. Perubahan mindset dan culture-set penyelenggaraan birokrasi yang semula berorientasi kerja (output) menjadi berorientasi kinerja (outcome) merupakan titik berat dalam konsep akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran dalam Rencana Kinerja dengan Realisasi Kinerja. Pencapaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel : Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja
1.	Persentase Temuan BPK yang selesai ditindaklanjuti	80 %	
	Persentase Temuan Inspektorat yang selesai ditindaklanjuti	100 %	
2.	Maturitas SPIP	Level 3	
3.	Persentase Pengaduan Masyarakat yang selesai ditindak lanjuti	100 %	
4.	Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa	86 Desa	
5.	Level APIP	Level 3	

Adapun penjelasan dari capaian kinerja dari target kinerja adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
---------------------	---

Sasaran strategis (1), Meningkatkan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dapat dicapai melalui 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

Pertama, Target Kinerja Persentase Temuan BPK yang selesai ditindaklanjuti ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 30% tunggakan kerugian negara/daerah dapat diselesaikan hanya dapat terealisasi sebesar 29,37% dengan rincian terdiri dari :

1. Kerugian Negara/Daerah Kab. :	Rp. 43.472.468.909,69
Barsel s.d Semester I Tahun 2023	
2. Pelunasan	: Rp. 5.975.409.922,78
3. Angsuran	: Rp. 6.790.928.270,34
4. Sisa	: Rp. 30.706.130.716,57
5. Persentase	: 70,63%

Posisi kerugian daerah pada Semester I 2023 adalah sebanyak 151 kasus sebesar sebesar Rp. 43.472.468.909,69 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kerugian daerah yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Pembebanan/Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) sebanyak 9 kasus sebesar Rp. 658.105.085,00 telah dilakukan pelunasan lima kasus sebesar Rp. 535.358.285,00 dan telah dilakukan pengembalian dengan angsuran sebesar Rp. 14.046.000,00 sehingga tersisa empat kasus sebesar Rp. 108.700.800,00 .
- 2) Tidak terdapat kerugian daerah yang sedang dalam proses penetapan;
- 3) Kerugian daerah yang masih berupa informasi sebanyak 142 kasus sebesar Rp. 42.814.363.824,69 telah dilakukan pelunasan 34 kasus sebesar Rp. 5.440.051.637,78 dan telah diangsur sebesar Rp. 6.776.882.270,34 sehingga terdapat sisa 108 kasus sebesar Rp. 30.597.429.916,57.

Kedua, Target Persentase Temuan Inspektorat yang selesai tindaklanjut temuan OPD tahun 2023 sebanyak 100% dari target tersebut dapat diselesaikan sebesar 37%.

Ratio Penyelesaian TLRHP Ekternal dan Internal :

$$(79,80 + 70,63)/2 = 75,22$$

Keterangan :

Persentase TLRHP BPK RI (Per Desember 2023) = 70,63%

Persentase TLRHP Inspektorat (Per Desember 2023) = 79,80%

Berdasarkan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Tahun 2023 sebagai berikut :

No	Nama OPD	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Pemantauan TL			Ket
				S	D	B	
1	DISNAKERTRANS	3	3	3	0	0	
2	DISDUKCATPIL	2	2	1	0	1	
3	DINAS KESEHATAN	15	15	10	5	0	
4	SEKRETARIAT DPRD	0	0	0	0	0	
5	BKPSDM	0	0	0	0	0	
6	SEKRETARIAT DAERAH	3	3	3	0	0	
7	DISKOMINFO	11	11	2	9	0	
8	KEC. JENAMAS	1	1	1	0	0	
9	KEC. GB AWAI	8	8	2	5	1	
10	DPM DAN PTSP	0	0	0	0	0	
11	DPK	3	3	1	2	0	
12	DLH	1	1	0	0	1	
13	BADAN KEBANGPOL	0	0	0	0	0	
14	DPPKBP3A	1	1	1	0	0	
15	DINAS PKPP	0	0	0	0	0	
16	BPKAD	11	11	0	11	0	
17	KEC. DUSUN UTARA	2	2	0	1	1	
18	KEC. DUSUN SELATAN	2	2	2	0	0	
19	KEC. KARAU KUALA	10	10	3	7	0	
20	KEC. DUSUN HILIR	10	10	0	10	0	
21	DINAS SOSIAL PMD	8	8	0	7	1	
22	BPBD	4	4	0	3	1	
23	DINAS PKUKM	1	1	1	0	0	
24	BPBD	2	2	2	0	0	
25	SATPOL PP DAMKAR	1	1	1	0	0	
26	DINAS PERHUBUNGAN	1	2	2	0	0	
27	DKPPP	2	5	0	0	5	
28	DISDAGKOP UKM	0	0	0	0	0	
29	DPPKBP3A	10	6	6	0	0	
	JUMLAH	112	112	41	60	11	
	PERSENTASE (%)			37%	54%	10%	

Catatan : Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kab. Barsel melakukan pengawasan pada 31 OPD.

Status Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan OPD Tahun 2023 sesuai rekomendasi (Status 1) sebanyak 41 kasus dari 122 rekomendasi APIP atau sebesar 37% dan Status Penyelesaian Tindak Lanjut Dalam Proses penyelesaian (Status 2) sebanyak 60 kasus atau sebesar 54% serta Status Penyelesaian yang Belum ditindaklanjuti sebanyak 11 kasus atau sebesar 10%.

Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah hasil pemeriksaan Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut :

No	Nama OPD	Nilai Temuan (Rp)	NILAI SETOR			Ket
			Lunas	Angsuran	Sisa	
1	DISNAKERTRANS	6,754,000	6,754,000	-	-	
2	DISDUKCATPIL	31,957,900	20,320,000	3.638.000	7.999.900	
3	Dinas Kesehatan	6,400,000	6,400,000	-	-	
4	SETDA	1,992,300	1,992,300	-	-	
5	Kec. Jenamas	150,000	150,000	-	-	
6	Kec. GB Awai	84,274	84,274	-	-	
7	DPK	33,553,800	33,553,800		-	
8	DLH	17,700,000	-	5.100.000	12.600.000	
9	DPPKBP3A	1,124,100	1,124,100	-	-	
10	BPKAD	2,429,918	2.429.918	-	-	
11	Kec. Dusun Selatan	3,166,133	3,166,133	-	-	
12	Kec. Karau Kuala	300,000	300,000	-	-	
13	Kec. Dusun Hilir	3,790,000	3.790.000	-	-	
14	Dinas Sosial PMD	1,560,000	1.560.000	-	-	
15	BPBD	2,750,600	2.750.600	-	-	
16	DINAS PKUKM	19,720,800	19,720,800	-	-	
17	BPBD	20.000.000	20.000.000	-	-	
18	SATPOL PP DAMKAR	5.446.200	5.446.200	-	-	
	JUMLAH	158.879.485,29	126.791.525,29	8.738.000	20.599.900	
	PERSENTASE (%)		79,80%	-	-	

Sasaran Strategis 2	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern (SPIP)
---------------------	--

Sasaran strategis (2) dengan Indikator Kinerja Utama Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern (SPIP) dengan Maturitas SPIP pada Tingkat Terdefinisi (Level 3) yakni terlaksananya praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik.

Sasaran Strategis 3	Meningkatnya Penanganan Pengaduan Masyarakat
------------------------	--

Sasaran strategis (3) Meningkatkan Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan Indikator Kinerja Utama Tercapainya Persentase Pengaduan Masyarakat yang selesai ditindaklanjuti sebesar 100%.

Rekapitulasi Laporan Masyarakat dan Pemeriksaan Khusus Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Jumlah Laporan Masyarakat	:	16
2. Jumlah Pemeriksaan Khusus	:	16
3. Jumlah Kerugian Negara / Daerah	:	Rp. 1.778.587.046,-
4. Persentase	:	100%

Sasaran Strategis 4	Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pengelolaan desa meliputi ADD dan DD
------------------------	---

Sasaran Strategis (4) Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa meliputi ADD dan DD dengan Indikator Kinerja Utama Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa terhadap 86 Desa di Kabupaten Barito Selatan. Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pengelolaan desa meliputi ADD dan DD Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Desa meliputi ADD dan DD Tahun 2023 yang sudah tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko dapat dilaksanakan terhadap 36 Desa di Kabupaten Barito Selatan.

Sasaran Strategis 5	Meningkatnya Kapabilitas APIP
------------------------	-------------------------------

Sasaran Strategis (5) Meningkatkan Kapabilitas APIP dengan Indikator Kinerja Utama tercapainya Kapabilitas APIP pada level 3 (dengan skor 3,000) yakni APIP di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan telah sanggup melakukan penilaian tentang efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan, serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal.

Pencapaian Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan tahun 2023 sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Capaian	Ket
1.	Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Persentase Temuan BPK yang selesai ditindaklanjuti	%	29,37	
		Persentase Temuan Inspektorat yang selesai ditindak lanjuti	%	37	
2.	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern (SPIP)	Maturitas SPIP	Level	3	
3.	Meningkatnya penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Pengaduan Masyarakat yang selesai ditindak lanjuti	%	100	
4.	Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pengelolaan desa meliputi ADD dan DD	Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa	Desa	36	
5.	Meningkatnya Kapabilitas APiP	Level APiP	Level	3	

Perbandingan Capaian Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan tahun 2022 dan tahun 2023.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Capaian		Ket
				2022	2023	
1.	Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Persentase Temuan BPK yang selesai ditindaklanjuti	%	20,42	29,37	
		Persentase Temuan Inspektorat yang selesai ditindaklanjuti	%	77	37	
2.	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Maturitas SPIP	Level	3	3	
3.	Meningkatnya penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Pengaduan Masyarakat yang selesai ditindak	%	100	100	

		lanjuti				
4.	Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pengelolaan desa meliputi ADD dan DD	Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa	Desa	60	36	
5.	Meningkatnya Kapabilitas APiP	Level APiP	Level	2+	3	

Sasaran Strategis yang dapat dicapai dengan kategori Berhasil (Tingkat Capaian 80% - 100%) yaitu :

1. Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. Target IKU Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti sebesar 30% tercapai 29,37%.
2. Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Target IKK dapat tercapainya Maturitas SPIP pada level 3,
3. Meningkatnya Penanganan Pengaduan Masyarakat. Target persentase pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti sebesar 100% dapat dilaksanakan 100%,
4. Meningkatnya Kapabilitas APiP. Target IKU level APiP dapat dicapai pada level 3 (dengan skor 3,000).

Sasaran Strategis yang tidak dapat mencapai keberhasilan maksimal (< 80%) yaitu :

1. Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. Target IKU Persentase temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti sebesar 100% tercapai 37%.
2. Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Pengelolaan Desa meliputi ADD dan DD. Target IKU Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa meliputi 86 desa di Kabupaten Barito Selatan tercapai 36 desa.

Dari 6 (enam) IKU yang telah ditetapkan sebagai dasar pengukuran pencapaian tujuan organisasi dapat menjadi tolok ukur bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2023 masih *belum mencapai keberhasilan maksimal*.

B. Realisasi Program dan Kegiatan

Berikut akan dijelaskan realisasi capaian Program dan Kegiatan yang dicapai Inspektorat kabupaten Barito Selatan tahun Anggaran 2023 sebagaimana tabel-tabel berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sebagaimana DPA Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023 untuk Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar **Rp.7.679.924.636,00** dengan Realisasi Keuangan sebesar **Rp. 6.828.188.009,00** atau **88,90%**.

b. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Realisasi Anggaran dan Keuangan untuk Program Penyelenggaraan Pengawasan sebesar **Rp. 2.257.956.100,00** dengan realisasi Keuangan sebesar **Rp. 1.795.985.500,00** atau **79,60%**.

c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Realisasi Anggaran dan Keuangan untuk Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi sebesar **Rp.219.061.200,00** dengan Realisasi Keuangan sebesar **Rp.128.061.200,00** atau **58,50%**.

Realisasi anggaran selengkapnya tertera pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 (Terlampir).

Realisasi Keuangan program dan kegiatan Inspektorat Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU APBD MURNI (Rp.)	PAGU APBD PERUBAHAN (Rp.)	Realisasi
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
INSPEKTORAT DAERAH	9.003.965.736	10.156.965.736	8.752.235.709 (86,17%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	7.208.772.486	7.679.924.636	6.828.188.009
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.993.250	64.363.250	50.288.250
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.800.000	16.880.000	16.530.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.800.000	10.800.000	8.300.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.333.250	36.683.250	25.458.250
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.374.922.982	5.374.922.982	5.083.572.908
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.271.746.982	5.271.746.982	4.982.331.908
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	103.176.000	103.176.000	101.241.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	48.020.250	42.984.000	16.670.250
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	48.020.250	42.984.000	16.670.250
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	361.860.500	429.847.638	358.714.611
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	65.561.500	65.561.500	65.500.000
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	23.827.000	51.534.000	24.097.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	272.472.000	312.752.138	269.117.611
Administrasi Umum Perangkat Daerah	803.872.000	1.315.735.900	910.368.190
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	294.498.600	518.208.500	237.361.240
Penyediaan Bahan Logistik	93.565.400	180.035.400	155.462.900
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	5.000.000	4.795.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	77.500.000	77.500.000	61.785.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	233.308.000	434.992.000	350.964.050
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	501.788.504	395.109.616	362.574.450
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000	21.446.000	14.330.500
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	146.988.504	38.843.616	35.643.950
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	334.800.00	334.800.000	312.600.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.375.000	56.961.250	45.999.350
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.375.000	56.961.250	45.999.350


PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.601.328.250	2.257.956.100	1.795.986.500
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.251.428.250	1.907.956.100	1.522.458.300
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	100.000.000	100.000.000	81.000.000
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	374.920.000	374.920.000	357.849.000
Reviu Laporan Kinerja	30.000.000	63.400.000	22.700.000
Reviu Laporan Keuangan	100.000.000	100.000.000	88.000.000
Pengawasan Desa	441.900.000	511.100.000	494.721.000
Kerjasama Pengawasan Internal	150.000.000	259.436.100	203.527.000
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	154.508.250	499.100.000	274.661.300
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	250.000.000	350.000.000	273.528.200
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	50.000.000	150.000.000	90.291.200
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	200.000.000	200.000.000	183.237.000
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	193.865.000	219.085.000	128.061.200
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	20.000.000	20.000.000	16.178.500
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	20.000.000	20.000.000	16.178.500
Pendampingan dan Asistensi	173.865.000	199.085.000	111.882.700
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	20.000.000	45.220.000	36.045.000
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	118.865.000	118.865.000	64.877.700
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	35.000.000	35.000.000	10.960.000

BAB IV. PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 disusun berdasarkan data dan fakta yang sebenarnya, yang sangat bermanfaat sebagai tolok ukur keberhasilan semua pihak di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam usaha mewujudkan tata kelola pemerintah daerah Kabupaten Barito Selatan yang bersih, berwibawa, bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Buntok, Pebruari 2024

Pt. INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,



YURISTIANTI YUDHA, S. Hut, M.M, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19731220 200801 2 010